



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021

## PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jl. Juanda No. 85 Palu, Tlp/Fax. (0451) - 424784

[www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id)

@2022



*“ Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan dapat membantu peningkatan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.”*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah disusun mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2022 dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi segala harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dimasa yang akan datang.

Palu, Februari 2022  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



MUEFRI, S.H., M.H.

## EXECUTIVE SUMMARY

**D**i dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Ketiga sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada 5 (lima) indikator kinerja. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tahun 2021 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan hal ini cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Ada 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021, yaitu :

1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu, pencapaian 100 %
2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding, pencapaian 82%
3. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan, pencapaian 101%
4. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu, pencapaian 100%
5. Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus, pencapaian 100%

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebesar **96,75 %**.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

<b>SASARAN STRATEGIS</b>			
<b>Meningkatnya Penyelesaian Perkara</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu :			
- Pidana	100%	100%	100%
- Perdata	100%	100%	100%
- Tipikor	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding			
- Pidana	60%	72%	120%
- Perdata	40%	36%	90%
- Tipikor	35%	13%	37%
c. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			
- Indeks kepuasan Masyarakat	93%	93,22%	105%
- Indeks persepsi Anti Korupsi	95%	96,25%	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I</b>			<b>93,50%</b>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>			
<b>Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a. Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			
- Pidana	100 %	100	100%
- Perdata	100 %	%	100%
- Tipikor	100%	100	100%
		%	
b. Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat diakses Secara Online dalm Waktu 1 Hari Setelah diputus	100%	100%	100%
		100%	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II</b>			<b>100%</b>
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021</b>			<b>96,75%</b>

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Eksekutif Summary .....	ii
Daftar isi .....	iv
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Grafik .....	v
Daftar Gambar .....	v
Daftar Lampiran .....	v

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	2
	C. Sistematika Laporan	9
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
	A. Rencana Strategis 2020-2024	10
	B. Rencana Kinerja Tahun 2021	16
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
	A. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	19
	B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	21
	C. Realisasi Anggaran dan Panjar Biaya Perkara	36
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan Umum	40
	B. Simpulan Capaian Kinerja	41
	C. Rencana Tindak	42
<b>Tabel</b>	1. Reviu Rencana Strategis 2020-2024	13
	2. Reviu Indikator Kinerja Utama	14
	3. Rencana Kinerja Tahunan 2021	16
	4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
	5. Capaian Kinerja Tahun 2021	20
	6. Capaian Sasaran Strategis 1	22
	7. Kondisi Perkara Tahun 2017 s/d 2021	22
	8. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	25

	9. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Di Tingkat Banding	27
	10. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	30
	11. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021	30
	12. Capaian Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat Tahun 2021	32
	13. Capaian Sasaran Strategis 2	33
	14. Capaian Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2021	34
	15. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 & 2020	37
	16. Realisasi Anggaran Dipa 01 Tahun 2021	37
	17. Realisasi Anggaran Dipa 03 Tahun 2021	38
	18. Keuangan Perkara Tahun 2021	39
<b>Grafik</b>	1. Jumlah Perkara Masuk Tahun 2017 s/d 2021	23
	2. Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan dan Perkara Putus Tahun 2017 s/d 2021	23
	3. Penyelesaian Perkara Tahun 2017 s/d 2021	25
<b>Gambar</b>	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tw IV Tahun 2021	31
	2. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Tw IV Tahun 2021	32
<b>Lampiran</b>	Struktur Organisasi	
	Indikator Kinerja Utama	
	Rencana Kinerja Tahunan 2021	
	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
	Matriks Reviu Renstra 2020-2024	
	Pengukuran Kinerja Tahun 2021	
	Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2021	
	Pernyataan Telah DiReviu	
	Check List Reviu	
	SK Tim Penyusunan LkjIP	
	Dokumentasi Implementasi Kinerja	
	Penghargaan Predikat Wilayah Bebas Korupsi	



*“LkjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”*

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait area 6 (enam) Penguatan Akuntabilitas bertujuan mewujudkan Manajemen Berbasis Kinerja dan Meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya sesuai Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Untuk itulah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten

- dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
  3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
  4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan mafaat yang diperoleh
  5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat
  6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat dan benar.

## B. KEDUDUKAN WEWENANG DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- ❖ Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- ❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- ❖ Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang - undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang - Undang No. 2

*Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
- Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

## STRUKTUR ORGANISASI

Pada tahun 2021 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri atas:

1. **Ketua** sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan,

masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku / perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta

terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat/ menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank

2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikannya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepastakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

4. **Panitera** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,

putusan, dokumen, bukudaftar, biayaperkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.

5. **Sekretaris** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi. Dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

6. **Panitera Muda Perdata** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan

menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7. **Panitera Muda Pidana** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. **Panitera Muda Khusus** bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus, pelaksanaan registrasi perkara khusus, pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi, Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju, pelaksanaan penyimpanan

berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum, Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Panitera.

9. **Panitera Muda Hukum** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

10. **Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian, Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik, Penyiapan bahan pelaksanaan

pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

**11. Kepala Bagian Umum dan Keuangan**

mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi : Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan, Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan, Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat, Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

**12. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran**

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

**13. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi**

bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

**14. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan**

bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik

negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

**15. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga**

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat

**16. Panitera Pengganti**

mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

## ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini beberapa hal yang menjadi isu strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah :

### 1. Produktifitas Penyelesaian Perkara,

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2020 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.

### 2. Manajemen Penanganan Perkara,

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu

diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.

sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

### 3. Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan,

tingginya jumlah perkara masuk ke MA disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

4. **Akses Terhadap Pengadilan,** Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2012 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

5. **Sumber Daya Manusia,** dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparat peradilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proffest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya

pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

6. **Fungsi pengawasan,** dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

Sistem Pengawasan Internal pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sudah baik, adanya aplikasi e-Montor sebagai alat membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

## C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selama tahun 2021 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Wewenang dan Fungsi, penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika dari penyajian LKjIP.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan Reviu Rencana Strategi 2020–2024 yang memuat Visi Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja serta Penetapan Kinerja Tahun 2022

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



**VISI :**

*"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang Agung"*

**MISI :**

*Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;  
Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;  
Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ; dan  
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.*

# BAB II

# PERENCANAAN

# KINERJA

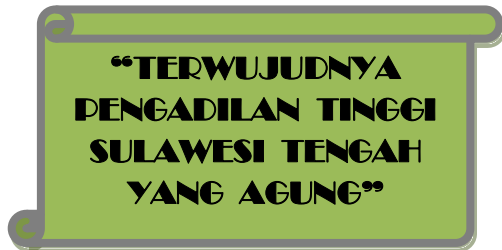
## A. RENSTRA 2020-2024

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 2020-2024 mengacu pada "blue print (cetak biru) dan renstra peradilan tinggi 2010-2035 telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024

## VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Mahkamah Agung RI yaitu



## MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

## TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yaitu Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan serta Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara.

## SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

### 1. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.*

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, Peninjauan Kembali
- Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

### 2. *Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.*

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

## PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. *Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.*  
*Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.*

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, Peninjauan Kembali

2. *Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI*  
*Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI*

Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Indeks persepsi masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

3. *Program : Peningkatan manajemen peradilan umum.*

*Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum.*

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

TUJUAN		TARGET (JANGKA MENENGAH)	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
Memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen pelaksanaan Tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	12 Bulan Layanan	18.032.170.000,-
				b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	60 %	60 %	62 %	63 %	63 %					
				c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat - Indeks Persepsi Anti Korupsi	93 %	93 %	95 %	95 %	95 %					
Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Manajemen peradilan umum	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	12 Bulan Layanan	19.449.300.000,-
				b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Secara tepat waktu	143 Perkara	252.412.000,-
				b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					

Tabel 1. Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator kinerja utama di gambarkan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum setelah perkara putus ditingkat banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks kepuasan pencari keadilan Catatan : • Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi IKM Indeks harus $\geq 80$	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta tertib administrasi	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Catatan: Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus Catatan : SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 2. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

## B. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memuat angka target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2021. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	60 % 40 % 35 %
		c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks kepuasan Masyarakat - Indeks Persepsi Anti Korupsi	93 % 95 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan 2021 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

### C. PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	62 % 45 % 40 %
		c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat - Indeks Persepsi Anti Korupsi	95 % 95 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 18.032.170.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 19.449.300.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 252.550.000,-



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MUEFRI, S.H., M.Hum**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H**  
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H. MUEFRI, S.H., M.H.



*"Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2021 adalah sebesar 96,75%"*

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempunyai beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa Target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini.

**CAPAIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Peningkatan penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:				
		- Pidana	100%	100%	100%	
		- Perdata	100%	100%	100%	
		- Tipikor	100%	100%	100%	
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding				
		- Pidana	60%	72%	120%	
		- Perdata	40%	36%	90%	
		- Tipikor	35%	13%	37%	
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan				
		- Indeks Kepuasan Masyarakat	93%	93,22%	100%	
- Indeks Persepsi Anti Korupsi	95%	96.25%	101%			
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 1					93,50%	
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu				
		- Pidana	100%	100%	100%	
		- Perdata	100%	100%	100%	
		- Tipikor	100%	100%	100%	
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 2					100%	
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021					96,75%	

Tabel 5. Capaian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA



### **Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.**

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan mengukur tingkat sisa perkara yang diselesaikan, penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu, tingkat penurunan sisa perkara yang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tingkat perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding maupun Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Data pada tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara pada tahun 2021 sebesar 93.50 %. Hal ini

menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien sehingga berhasil mempertahankan capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara.

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

- Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding
- Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

**CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I**  
**PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan penyelesaianPerkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding			
		- Pidana	60%	72%	120%
		- Perdata	40%	36%	90%
		- Tipikor	35%	13%	37%
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
		- Indeks Kepuasan Masyarakat	93%	93.22%	100%
- Indeks Persepsi Anti Korupsi	95%	96.25%	101%		

Tabel 6. Capaian Sasaran Strategis Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

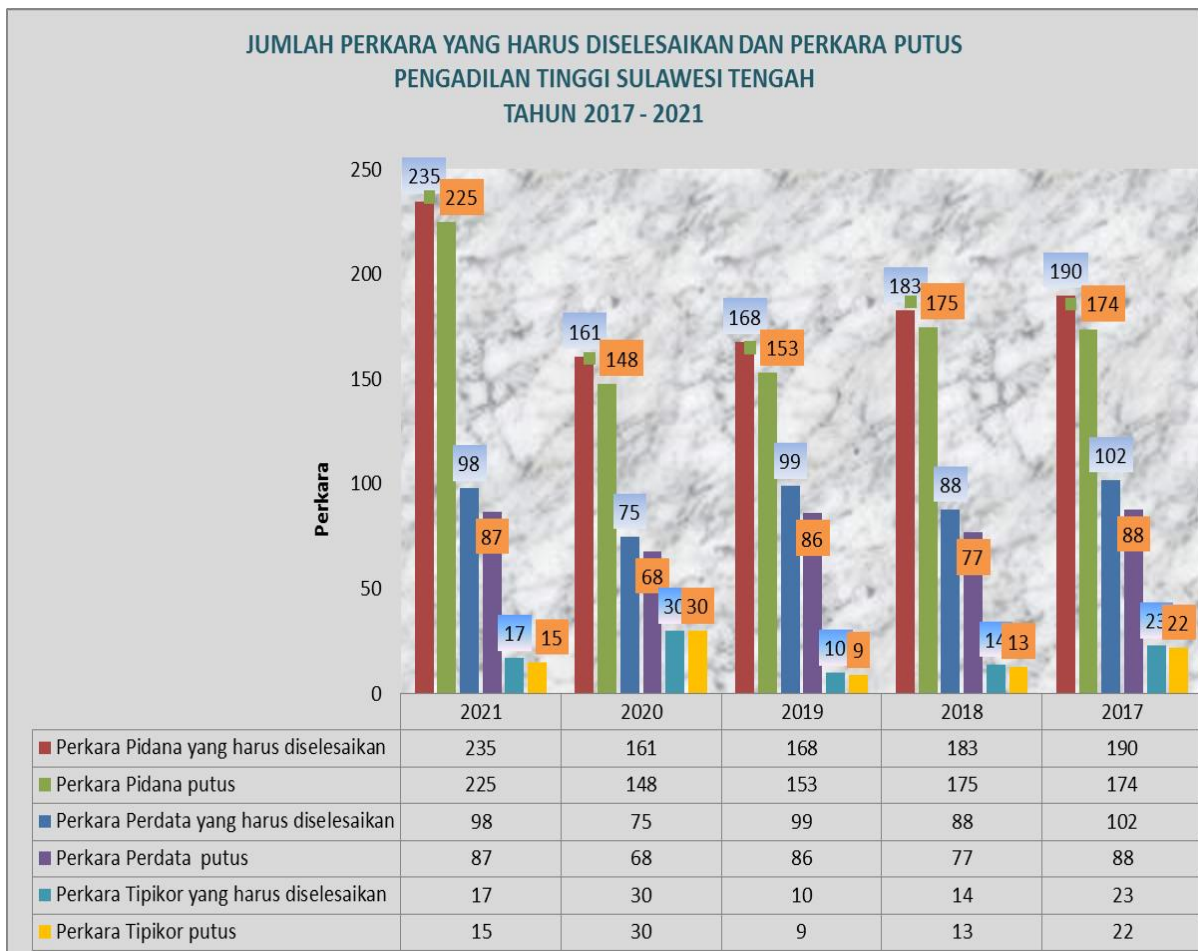
**KONDISI PERKARA**  
**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2017 S/D 2021**

THN	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA	PERKARA MASUK	PERKARA YG HARUS DISELESAIKAN	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	SISA PERKARA	PERSENTASE PENANGANAN PERKARA
2021	Pidana	13	222	235	225	10	95,74%
	Perdata	7	91	98	87	11	88,78%
	Tipikor	0	17	17	15	2	88,24%
2020	Pidana	15	146	161	148	13	91,93%
	Perdata	13	62	75	68	7	90,67%
	Tipikor	1	29	30	30	0	100%
2020	Pidana	8	160	168	153	15	91,07%
	Perdata	11	88	99	86	13	86,87%
	Tipikor	1	9	10	9	1	90%
2018	Pidana	16	167	183	175	8	95,63%
	Perdata	14	74	88	77	11	87,5%
	Tipikor	1	13	14	13	1	92,86%
2017	Pidana	15	175	190	174	16	91,58%
	Perdata	14	88	102	88	14	86,27%
	Tipikor	1	22	23	22	1	95,65%

Tabel 7. Kondisi Perkara Tahun 2017 s/d 2021



Grafik 1. Jumlah Perkara Masuk Tahun 2017 s/d 2021



Grafik 2. Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan dan Perkara Putus Tahun 2017 s/d 2021



## **Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Ukuran capaian indikator kinerja persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Artinya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian sisa perkaranya 100%.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu dilaksanakan berdasarkan kebijakan dari surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding.

Capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara pidana dan perdata semua mencapai 100% sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Untuk perkara pidana yang telah diselesaikan selama tahun 2021 sebanyak 225 perkara sedangkan untuk perkara perdata yang telah diselesaikan selama tahun 2021 sebanyak 87 perkara

Perkara pidana khusus yang ditanganani di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah pidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang waktu penyelesaiannya adalah maksimal 60 hari sesuai diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

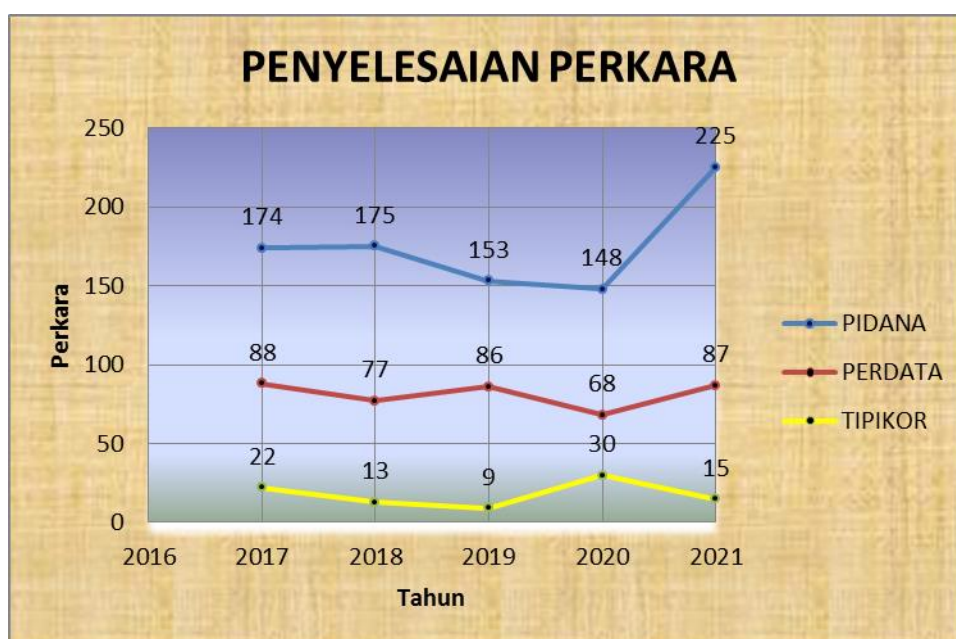
Peningkatan tersebut didukung oleh karena adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, adanya reward dan punishment dalam penyelesaian perkara, serta karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan pidana khusus.

Capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara Tipikor mencapai 100% sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Untuk perkara tipikor yang telah diselesaikan selama tahun 2021 sebanyak 15 perkara.

Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam dalam system informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu, yaitu one day publish (satu hari setelah putus) dengan 1. Memberi reward dan punishment dalam kinerja penyelesaian perkara. 2. Meningkatkan monitoring dan pengawasan rutin oleh Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Tingkat Pertama melalui rapat koordinasi, Whatsapp Group.

THN	JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Pidana	225	225	100%	100%	100%
	Perdata	87	87	100%	100%	100%
	Tipikor	15	15	100%	100%	100%
2020	Pidana	148	148	100%	100%	100%
	Perdata	68	68	100%	100%	100%
	Tipikor	30	30	100%	100%	100%
2020	Pidana	153	153	100%	100%	100%
	Perdata	86	86	100%	100%	100%
	Tipikor	9	9	100%	100%	100%
2018	Pidana	175	175	100%	100%	100%
	Perdata	77	77	100%	100%	100%
	Tipikor	13	13	100%	100%	100%
2017	Pidana	174	174	100%	100%	100%
	Perdata	88	88	100%	100%	100%
	Tipikor	22	22	100%	100%	100%

Tabel 8. Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu



Grafik 3. Penyelesaian Perkara Tahun 2017 s/d 2021

Dari grafik diatas menunjukkan penyelesaian Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif. Penyelesaian perkara pidana di tahun 2020 sebanyak 148 perkara sedangkan di tahun 2021 penyelesaian perkara pidana sebanyak 225 perkara atau mengalami peningkatan sebesar 52%. Hal ini disebabkan perkara masuk di Tahun 2021 mengalami kenaikan sangat signifikan sebanyak 222 perkara atau sebesar 52% dari tahun 2020. Capaian Realisasi penyelesaian perkara pidana mencapai 100% ini juga didukung oleh adanya

evaluasi dan monitoring secara berkala, adanya reward dan punishment dalam penyelesaian perkara, serta karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan pidana.

Penyelesaian perkara perdata di tahun 2020 sebanyak 68 perkara sedangkan di tahun 2021 penyelesaian perkara perdata sebanyak 87 perkara atau mengalami peningkatan sebesar 27%. Hal ini disebabkan perkara masuk di Tahun 2021 mengalami kenaikan sangat signifikan sebanyak 91 perkara atau sebesar 46% dari tahun 2020. Capaian Realisasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu mencapai 100% ini juga didukung oleh adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, adanya reward dan punishment dalam penyelesaian perkara, serta karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan perdata.

Begitupun penyelesaian perkara tipikor di tahun 2020 sebanyak 30 perkara sedangkan di tahun 2021 penyelesaian perkara tipikor sebanyak 15 perkara atau mengalami penurunan sebesar 50%. Hal ini disebabkan perkara masuk di Tahun 2021 mengalami penurunan sangat signifikan sebanyak 29 perkara atau sebesar 71% dari tahun 2020. Capaian Realisasi penyelesaian perkara tipikor tepat waktu mencapai 100% ini juga didukung oleh adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, serta karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan tipikor sehingga tidak melewati batas waktu SOP.



### **Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Ditingkat Banding**

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara yang telah diputus. Dalam artian secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum setelah putus ditingkat banding, maka pencari keadilan semakin puas atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

THN	JENIS PERKARA	PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN	PERKARA TIDAK LANJUT UPAYA HUKUM	PERKARA LANJUT UPAYA HUKUM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Pidana	225	161	64	60%	72%	120%
	Perdata	87	31	56	40%	36%	90%
	Tipikor	30	4	26	35%	13%	37%
2020	Pidana	148	85	50	60%	57%	95%
	Perdata	68	24	44	40%	35%	78%
	Tipikor	30	10	20	35%	33%	94%
2019	Pidana	153	65	89	45%	42%	93%
	Perdata	86	31	55	35%	36%	103%
	Tipikor	9	3	6	33%	33%	100%
2018	Pidana	175	106	70	45%	61%	133%
	Perdata	77	11	66	15%	14%	93%
	Tipikor	13	1	12	15%	7%	47%

Tabel 9. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Ditingkat Banding

Berdasarkan pada tabel diatas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan ditingkat banding untuk perkara Pidana menetapkan target tahun 2021 sebesar 60%, mencapai realisasi sebesar 72% sehingga capaian yang didapatkan diatas target yang telah ditentukan sebesar 120 % hal ini menandakan bahwa masyarakat pencari keadilan merasa puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sehingga tidak melakukan upaya hukum selanjutnya.

Untuk perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan ditingkat banding pada Tahun 2021 tidak mencapai target sebesar 40% dengan realisasi sebesar 36% sehingga capaian yang didapatkan sebesar 90% hal ini dalam perkara perdata para pihak penggugat maupun tergugat tidak dapat menilai secara objektif hasil putusan perkara sehingga akan melakukan upaya hukum berikutnya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2020 capaian realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan ditingkat banding sebesar 78 % sehingga ditahun 2021 mengalami kenaikan.

Sedangkan untuk perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putusan ditingkat banding pada Tahun 2021 juga tidak mencapai target sebesar 35% dengan realisasi sebesar 13% sehingga capaian yang didapatkan hanya sebesar 37% Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, masyarakat pencari keadilan yang melakukan upaya hukum kasasi semakin meningkat. Secara umum biasanya Jaksa yang

mengajukan kasasi disebabkan karena tidak puas dengan vonis putusan pengadilan yaitu putusan pidana yang dijatuhkan jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya.

Hal ini yang mengharuskan jaksa mengajukan upaya hukum kasasi. Berapapun banyak jumlah kasasi dalam perkara pidana yang dimohonkan jaksa atau terdakwa tidak bisa dibatasi oleh pengadilan. Sebab, pengadilan bersifat pasif dan hanya menerima dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan tidak pernah mencari perkara. Perkara yang masuk ke pengadilan akan diterima dan ditangani. Dalam UU kekuasaan Kehakiman, pengadilan juga tidak boleh menolak perkara.



### **Indikator Kinerja Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase indeks persepsi pencari keadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan dengan dua cara pengukuran yaitu :

1. Melalui pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi.
2. Melalui pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi.

#### **1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengukur seberapa besar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dilakukan Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat secara online yang dapat diakses melalui website Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan alamat <http://survey.pt-palu.go.id/>.

Survey ini dilakukan untuk dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan agar pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah lebih maksimal.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan, 6 (enam) hari kerja;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 (enam) hari kerja;
- c. Pengolahan data indeks, 6 (enam) hari kerja;
- d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 (enam) hari kerja.

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mengukur tingkat pencapaian pelayanan masyarakat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Mencari inovasi baru dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan bagi

pengembangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Dari hasil analisis terhadap data survey yang dilakukan, disimpulkan :

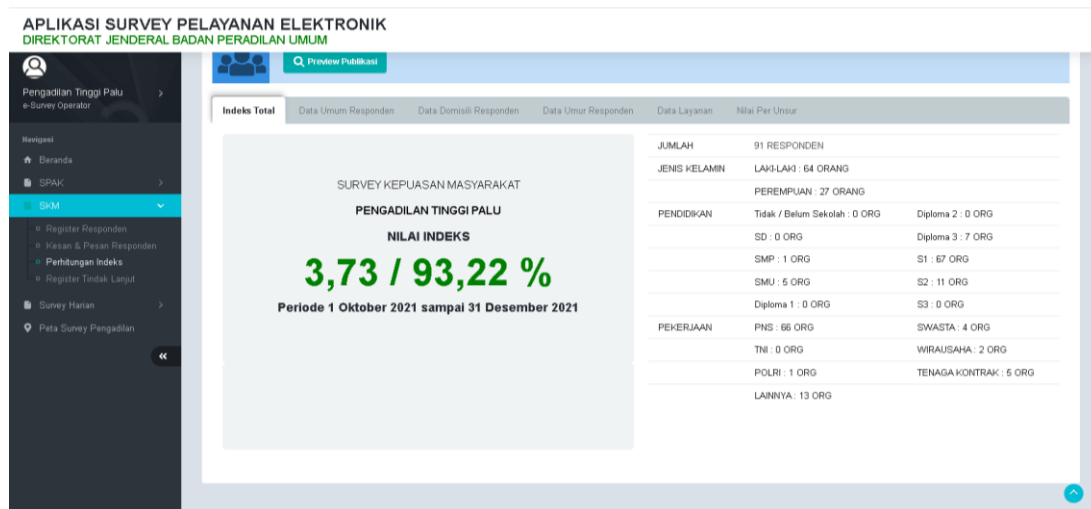
1. Jika dilihat dari karakteristik responden, disimpulkan bahwa pengunjung pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sangat variatif dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan, sehingga sangat perlu untuk meningkatkan pelayanan;
2. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2021 dilakukan secara 4 periode yaitu Triwulan I s/d Triwulan IV. Secara umum pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sangat baik, hal tersebut terlihat dari hasil survey tahun 2021 semester I memperoleh nilai yaitu 87.15 sedangkan disemester II dengan Nilai IKM = 87,72 (Sangat Baik).
3. Berdasarkan hasil survey dan analisis data survey, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masing-masing unsur layanan pada triwulan IV adalah sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan	Nilai SKM Unsur Layanan (x 25)	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	342	3,758	93,96	Sangat Baik	3
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	337	3,703	92,58	Sangat Baik	6
3	Waktu Penyelesaian	322	3,538	88,46	Sangat Baik	9
4	Biaya/Tarif	345	3,791	94,78	Sangat Baik	2
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	341	3,747	93,68	Sangat Baik	4
6	Kompetensi Pelaksana	334	3,670	91,76	Sangat Baik	8
7	Perilaku Pelaksana	338	3,714	92,86	Sangat Baik	5
8	Sarana dan Prasarana	337	3,703	92,58	Sangat Baik	7
9	Penanganan Pengaduan	358	4,934	98,35	Sangat Baik	1

Tabel 10. Nilai rata-rata Unsur Pelayanan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TAHUN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	93%	93.22%	100%
2020	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	89%	99%
2019	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85%	87%	96%

Tabel 11. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021



Gambar 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2021

## 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

Sasaran Survei Persepsi Anti Korupsi adalah Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan dan tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

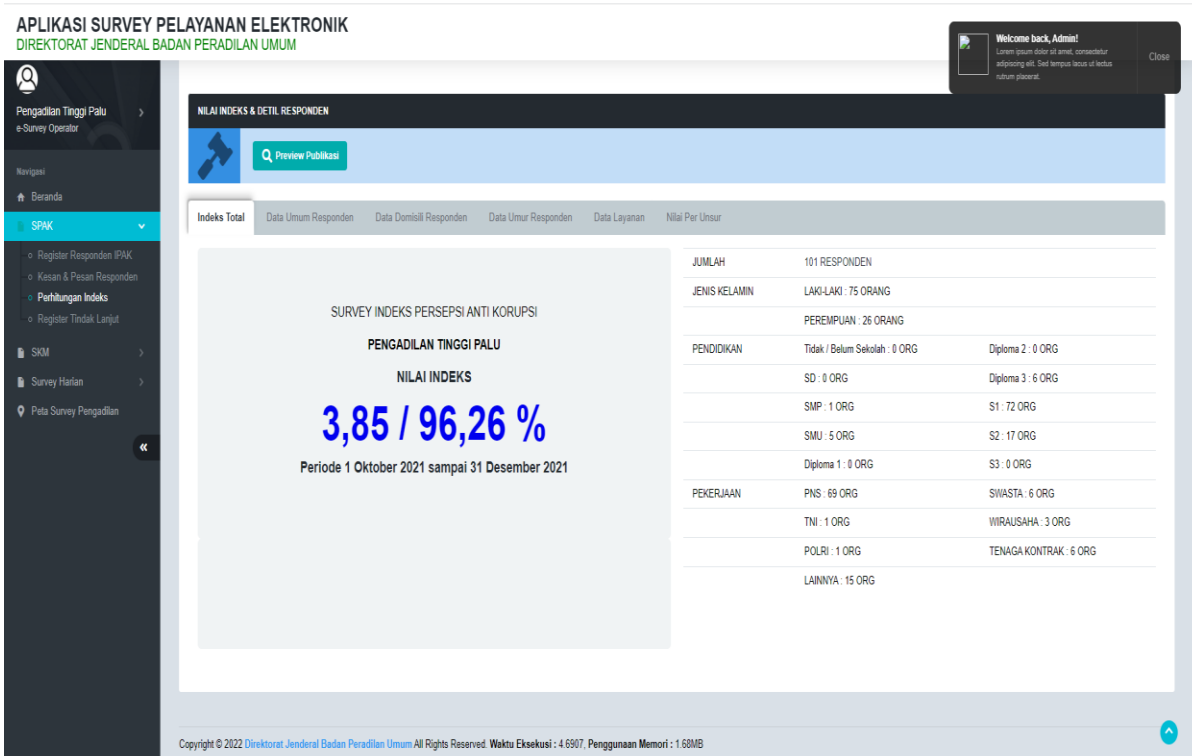
Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,85 atau **96.25%** masuk pada kategori Bersih Dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut

merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,881
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,941
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,921
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,743
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,663
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,752
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,792
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,931
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,911
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,970

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2021 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,9 atau masuk pada persepsi Bersih Dari Korupsi.



Gambar 2. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel diatas Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2021 realisasi sebesar 87,72% meningkat dari Tahun 2020 hal ini menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat pencari keadilan.

TAHUN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			
	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Indeks Persepsi Anti Korupsi	93 % 95 %	93,22 % 96,25 %	100 % 101 %

Tabel 12. Capaian Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat Tahun 2021



## Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran stategis “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara.

Sasaran ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu : (1) Persentase salinan putusan yang dikirim

ke Pengadilan pengaju tepat waktu; (2) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Rata-rata capaian sasaran ini pada tahun 2021 sebesar 100%. Seluruh indikator pada sasaran ini mencapai target 100%.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
	b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%

Tabel 13. Capaian Sasaran Strategis 2

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih terus berupaya melaksanakan

penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
- Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus



### **Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu**

Ukuran realisasi Indikator Kinerja Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Sesuai SEMA No 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA No 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan.

Ada hal-hal yang diatur tentang penyampaian salinan dan petikan putusan dalam SEMA No 01 Tahun 2011, yaitu :

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya

- PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan yang bersangkutan
2. Untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP
  3. Petikan Putusan perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga pasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan
  4. Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH 2021**

<b>JENIS PERKARA</b>	<b>PERKARA YG TELAH DISELESAIKAN</b>	<b>SALINAN &amp; PETIKAN PUTUSAN YANG TELAH DIKIRIM</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
Pidana	225	225	100%	100%
Perdata	87	87	100%	100%
Tipikor	15	15	100%	100%

Tabel 14. Capaian Salinan Putusan yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel diatas target Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu yaitu sebesar 100 % dan realisasi pada Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mencapai 100 % karena setiap perkara yang telah diputus segera dikirimkan ke pengadilan pengaju sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Indikator ini diukur dengan pencatatan yang valid dari tanda terima pengiriman berkas melalui pihak pengirim (Pos Indonesia). Kondisi pengiriman salinan putusan ke Pengadilan tepat waktu telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

### ★★ **Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus**

Ukuran realisasi Indikator Kinerja Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah Perbandingan antara Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus sesuai SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan.

Selama Tahun 2021 keadaan jumlah perkara tipikor sebagai berikut :

- Sisa perkara tahun 2020 : 0 Perkara
- Perkara Masuk Tahun 2021 : 17 Perkara
- Perkara Putus Tahun 2021 : 15 Perkara
- Sisa Perkara Tahun 2021 : 2 Perkara

Berdasarkan data diatas menunjukkan pada tahun 2021 seluruh perkara tipikor yang telah putus sudah dipublikasikan di website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

pengadilan Tingkat Banding Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga mempublikasikan putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Sehingga putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus yang ditargetkan 100% dapat direalisasikan 100%.

Adapun perkara perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus yaitu : Nomor 13/Pid.sus-Tpk/2021perkara tentang gratifikasi kepada pejabat daerah.

## C. REALISASI ANGGARAN DAN PANJAR BIAYA PERKARA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi :
  - Belanja Pegawai, meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur
  - Belanja Barang, yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
  - Belanja Modal, Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan

pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang, Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan.

Pada awal tahun 2021, total anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 18.032.170.000,- (delapan belas miliar tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Dan total Realisasi anggaran DIPA tahun 2021 adalah sebesar Rp 17.076.387.378,- (tujuh belas miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,22 % yang artinya realisasi anggaran sudah dapat dikatakan optimal.

Adapun perbandingan antara realisasi anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	REALISASI		NAIK (TURUN)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Belanja Pegawai	15.047.959.528,-	16.986.038.864,-	-1.938.078.936,-	-12,88
2.	Belanja Barang	3.301.375.117,-	3.590.714.220,-	- 289.339.103,-	-8,76
3.	Belanja Modal	137.460.000,-	121.963.500,-	15.496.500,-	11,27
	<b>Jumlah</b>	<b>18.486.794.645,-</b>	<b>20.698.716.584,-</b>	<b>2.211.921.939,-</b>	<b>11,96</b>

Tabel 15. Perbandingan Realisasi anggaran Tahun 2021 & Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2021 realisasi anggaran belanja pegawai turun sebesar 12,88 % dibandingkan dengan Tahun 2020 hal ini disebabkan banyak Hakim Tinggi yang mutasi serta selama 3 bulan posisi Wakil Ketua yang kosong. Sedangkan untuk belanja barang pun mengalami penurunan hal ini antara lain disebabkan karena pada tahun 2021

terdapat refofusing anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- Belanja modal juga mengalami kenaikan sebesar 11,27 %.

Berikut alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2021, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum :

### Pagu Dan Realisasi Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Pegawai	15.104.616.000,-	15.047.959.528,-	99,62
2.	Belanja Barang	3.158.434.000,-	3.072.486.416,-	97,28
3.	Belanja Modal	137.500.000,-	137.460.000,-	99,97
	<b>Jumlah</b>	<b>18.400.550.000,-</b>	<b>18.257.905.944,-</b>	<b>99,22</b>

Tabel 16. Realisasi anggaran Dipa 01 Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 secara keseluruhan pencapaian realisasi anggaran sangat baik yaitu mencapai 99,22 % yang artinya realisasi anggaran sudah dapat dikatakan optimal.

## Pagu Dan Realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Barang	231.560.000,-	228.888.701,-	98,85%
	<b>Total Belanja</b>	<b>231.560.000,-</b>	<b>254.903.701,-</b>	<b>98,85%</b>

Tabel 17. Realisasi anggaran Dipa 03 Tahun 2021

Dari keseluruhan pagu anggaran Dipa 03 yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

## Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri.

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan

kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staadblaad tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (Reglementvan het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatblaad 1927 no.227). Secara

operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI

Nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009. Adapun rekapitulasi keuangan perkara tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat ditampilkan sebagai berikut :

PERIODE	SALDO AWAL (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
Januari	152.000	1.650.000	1.498.000	304.000
Februari	304.000	600.000	790.000	114.000
Maret	114.000	1.350.000	1.255.000	209.000
April	209.000	1.200.000	1.181.000	228.000
Mei	228.000	600.000	676.000	152.000
Juni	152.000	1.650.000	1.593.000	209.000
Juli	209.000	1.800.000	1.705.000	304.000
Agustus	304.000	600.000	676.000	228.000
September	228.000	1.350.000	1.312.000	266.000
Oktober	266.000	900.000	913.000	253.000
Nopember	253.000	1.200.000	1.193.000	260.000
Desember	260.000	600.000	640.000	220.000
<b>J u m l a h</b>		<b>13.500.000</b>	<b>13.432.000</b>	

Tabel 18. Keuangan Perkara Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



## BAB IV PENUTUP

### A. SIMPULAN UMUM

Seesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas selama tahun 2021. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2024 memiliki sasaran program beserta IKU dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran program. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melaksanakan tiga program teknis, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

- Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
2. Strategi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2020 - 2024 adalah, Peningkatan Kinerja dengan meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yaitu memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan, memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi untuk pelayanan publik.
  3. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- 1) Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
  - 2) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Setelah Perkara Putus di Tingkat Banding
  - 3) Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
  - 4) Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
  - 5) Persentase Putusan Perkara Tipikor yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus
4. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Tahun 2020 sehingga lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta Penguatan kualitas sumber daya aparaturnya agar menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat

## B. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2021 yang mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100 % hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menjalankan SOP dengan baik.
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding pada umumnya disebabkan karena Pembanding/Terbanding tidak puas dengan putusan pengadilan Tingkat Banding yaitu putusan perdata yang dijatuhkan. Hal ini yang mengharuskan Pembanding/Terbanding mengajukan upaya hukum kasasi. Sedangkan berapapun banyak jumlah kasasi dalam perkara perdata yang dimohonkan Pembanding/Terbanding tidak bisa dibatasi oleh pengadilan karena dalam UU kekuasaan Kehakiman, pengadilan juga tidak boleh menolak perkara. Sehingga untuk perkara perdata capaian realisasi sebesar 82%.
3. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai target 100% hal ini menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien.

4. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus mencapai target 100%.

### C. RENCANA TINDAK

Ada beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi untuk kedepannya salah satu sangat berpengaruh yaitu adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang mempengaruhi performa kinerja organisasi sehingga untuk menghambat penyebaran virus tersebut pemerintah berupaya menerapkan strategi *social distancing* di lingkungan instansi layanan publik dengan sistem kerja *work from home (wfh)*. Imbasnya hal ini sangat menghambat proses kinerja proses peradilan yang telah ditargetkan.

Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparat peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

-----o0o-----



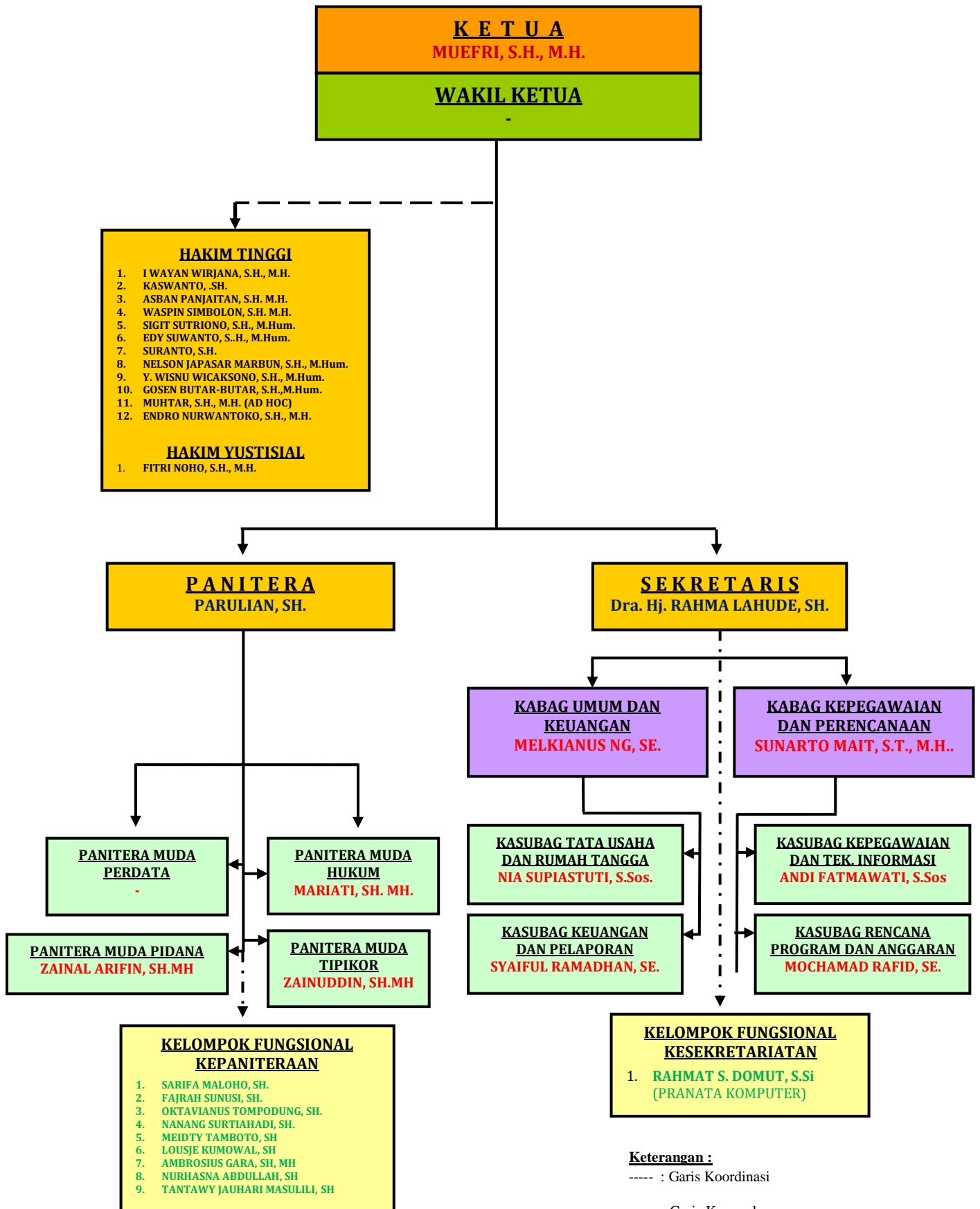
# **LAMPIRAN**



**LAMPIRAN I :**

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2021**

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
PERMA NO.7 TAHUN 2015**



**Keterangan :**  
----- : Garis Koordinasi

          : Garis Komando

**LAMPIRAN II :**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2021**

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.</li> <li>• Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> </ul>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding.</li> </ul>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Index kepuasan pencari keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi IKM index harus <math>\geq 62,51</math></li> </ul>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p>Perbandingan jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu dengan jumlah keseluruhan perkara yang diminutasi/dikirim</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tepat waktu sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung</li> <li>• Minutasi adalah proses penyusunan putusan yang dilakukan oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan beserta publikasi putusan</li> </ul>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	<p>Perbandingan antara Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus</p> <p>Catatan :</p> <p>SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan</p>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**LAMPIRAN III :**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2021**

**REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	1 Layanan	18.263.050.000,00
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Pidana - Perdata - Tipikor	60 % 40 % 35 %					
	c. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat - Indeks Persepsi Anti Korupsi	93 % 95 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	1 Layanan	137.500.000,00
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %					
	b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Secara tepat waktu	155 Perkara	231.550.000,00



**LAMPIRAN IV :**

**PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MUEFRI, S.H., M.Hum**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H**  
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Dr. H. PRIM HARYADI, S.H., M.H.



MUEFRI, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding - Pidana - Perdata - Tipikor	62 % 45 % 40 %
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan - Indeks Kepuasan Masyarakat - Indeks Persepsi Anti Korupsi	95 % 95 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 18.032.170.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 19.449.300.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 252.550.000,-

**LAMPIRAN V :**

**MATRIKS REVIU RENSTRA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2020-2024**

# REVIU MATRIKS RENSTRA 2020-2024

## PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

TUJUAN		TARGET (JANGKA MENENGAH)	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
Memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	100 % 100 % 100 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dukungan manajemen pelaksanaan Tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	12 Bulan Layanan	18.032.170.000,-
	- Pidana			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	- Perdata			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding			b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding										
	- Pidana	60 %		- Pidana	60 %	60 %	62 %	63 %	63 %					
	- Perdata	40 %		- Perdata	40 %	40 %	45 %	45 %	45 %					
	- Tipikor	35 %		- Tipikor	35 %	35 %	40 %	40 %	40 %					
	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan						Peningkatan Manajemen peradilan umum	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	12 Bulan Layanan	19.449.300.000,-
	- Indeks Kepuasan Masyarakat	93 %		- Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	93 %	95 %	95 %	95 %					
	- Indeks Persepsi Anti Korupsi	95 %		- Indeks Persepsi Anti Korupsi	93 %	95 %	95 %	97 %	97 %					
Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100 % 100 % 100 %	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding Secara tepat waktu	143 Perkara	252.412.000,-
	- Pidana			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	- Perdata	100 %		- Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
	- Tipikor	100 %		- Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
	Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %		b. Persentase perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					



**LAMPIRAN VI :**

**PENGUKURAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2021**

**CAPAIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul> <p>b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ditingkat banding</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul> <p>c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Indeks Persepsi Anti Korupsi</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>60%</p> <p>40%</p> <p>35%</p> <p>93%</p> <p>95%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>72%</p> <p>36%</p> <p>13%</p> <p>93,22%</p> <p>96.25%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>120%</p> <p>90%</p> <p>37%</p> <p>100%</p> <p>101%</p>
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 1					93,50%
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul> <p>b. Persentase putusan perkara tipikor yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 2					100%
<b>Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021</b>					<b>96,75%</b>

**LAMPIRAN VII :**

**PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2021**



A blue scroll graphic with a black outline and a drop shadow. The scroll is unrolled in the middle, with the top and bottom edges curled up. The text is centered within the unrolled portion.

**LAMPIRAN VIII :**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2021**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.


Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, Februari 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



**DR. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum**



**LAMPIRAN IX :**  
**CHECKLIST REVIU**  
**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**



**LAMPIRAN X :**

**SK TIM PENYUSUNAN LKjIP  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2021**



## PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu  
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866  
Email : [anggaranpt.palu@gmail.com](mailto:anggaranpt.palu@gmail.com)  
Website : [www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id)  
Palu 94117

### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH NOMOR W21-U/ 23 /OT.01.2/I/2022

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

#### KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Kementrian Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  - Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.;
  - Nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan tersebut ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  - Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI ;
  - Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;



## PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu  
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866  
Email : anggaranpt.palu@gmail.com  
Website : [www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id)  
Palu 94117

7. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI ;  
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Tim Kerja untuk Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
- Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di P a l u  
Pada tanggal 27 Januari 2022.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

MUEFRI, SH.,MH.



## PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof Moh Yamin No. 01 Palu  
Telp : (0451) 454866-424784 Fax : (0451) 454866  
Email : [anggaranpt.palu@gmail.com](mailto:anggaranpt.palu@gmail.com)  
Website : [www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id)  
Palu 94117

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Nomor W21-U/ 23 /OT.01.2/I/2022  
Tanggal 27 Januari 2022

### TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021 DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Pelindung / penasehat : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Ketua : Gede Ariawan, S.H.,M.H.

Wakil Ketua 1 : Gosen Butar Butar,S.H.,M.Hum.

Sekretaris :

- Parulian Hasibuan, S.H.
- Dra. Hj. Rahma Lahude, S.H.
- Sunarto Mait, S.T.,M.H.
- Mochamad Rafid, S.E.

Anggota :

- Mariati, S.H.,M.H.
- Zainuddin, S.H.,M.H.
- Zainal Arifin, S.H.,M.H.
- Melkianus Nggodulano, S.E.
- Nanang Surtiahadi, SH
- Sofliana Coniasrika, S.E.
- Mulfi, S.H.
- Andi Yuliansyah, A.Md
- Hega Amirin Asshidiqqie, A.Md

Ditetapkan di P a l u  
Pada tanggal 27 Januari 2022.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



*Muefri*  
MUEFRI, SH.,MH.



**GAMBAR :**

**DOKUMENTASI IMPLEMENTASI KINERJA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
2021**

## DOKUMENTASI IMPLEMENTASI KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

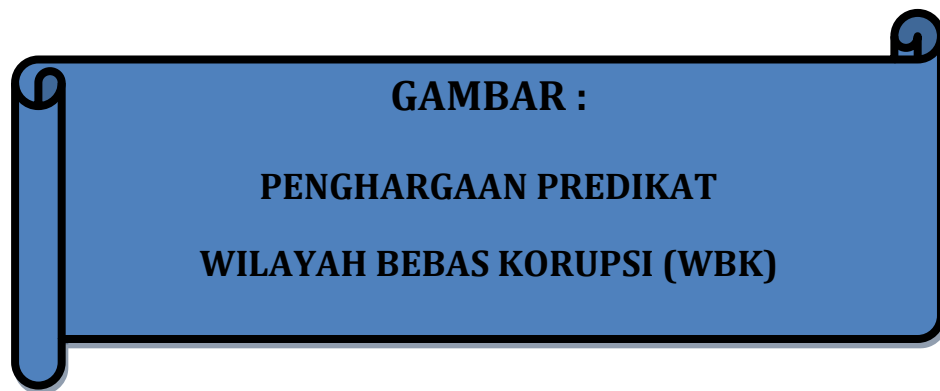


**DOKUMENTASI IMPLEMENTASI KINERJA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**



## DOKUMENTASI IMPLEMENTASI KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH





**PENGHARGAAN PREDIKAT  
WILAYAH BEBAS KORUPSI**



**PIAGAM PENGHARGAAN**



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**  
Memberikan Penghargaan Kepada:

**Pengadilan Tinggi Palu**  
atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat  
**WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**

Jakarta, 21 Desember 2020  
Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi



**Tjahjo Kumolo**

